

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak kebijakan pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001 diharapkan pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan di pusat. Hal ini sejalan dengan pendapat Juli P.S (2003 : 1) yang menyatakan bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Namun seiring dengan diterapkannya otonomi daerah mengakibatkan ketidakstabilan kesiapan pemerintah Kabupaten/Kota utamanya dalam hal keuangannya karena kinerja keuangannya, karena kinerja keuangan menjadi tolak ukur kesiapan pemerintah Kabupaten/Kota (Bambang Haryadi, 2002). Hal ini memang menjadi konsekuensi logis daerah otonom yakni pemerintah daerah harus lebih mandiri dari segala hal termasuk dari segi keuangan.

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Abdul Halim, 2009).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran (Abdul Halim, 2002). Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah (Abdul Halim, 2009).

Dalam Laporan Realisasi APBD dapat dilihat gambaran dari belanja daerah dari masing-masing Kabupaten dan Kota yang diteliti. Pada tabel 1.1 berikut ini disajikan data pertumbuhan belanja daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

TABEL 1.1
Data Pertumbuhan Belanja Daerah
Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat

(dalam jutaan rupiah)

No	NAMA KOTA/KAB	BELANJA DAERAH (Rp)		% Pertumbuhan
		2009	2010	
1.	Kab. Bandung	1,704,152	2,093,854	22,86 %
2.	Kab. Bekasi	2,038,392	1,791,206	- 12,13 %
3.	Kab. Bogor	2,277,690	2,516,354	10,48 %
4.	Kab. Ciamis	1,236,607	1,297,817	4,94 %
5.	Kab. Cianjur	1,230,945	1,309,832	6,40 %
6.	Kab. Cirebon	1,190,594	1,366,526	14,78 %
7.	Kab. Garut	1,345,088	1,493,759	11,05 %
8.	Kab. Indramayu	1,270,389	1,307,191	2,89 %
9.	Kab. Karawang	1,356,594	1,478,725	9,01 %
10.	Kab. Kuningan	849,687	1.009,871	18,86 %
11.	Kab. Majalengka	922,246	1,144,016	24,04 %
12.	Kab. Purwakarta	773,963	979,823	26,60 %
13.	Kab. Subang	1,045,615	1,110,508	6,20 %
14.	Kab. Sukabumi	1,320,180	1,549,051	17,33 %
15.	Kab. Sumedang	926,169	1,016,430	9,74 %
16.	Kab. Tasikmalaya	1,176,168	1,181,368	0,45 %
17.	Kota Bandung	2,453,724	2,461,712	0,32 %
18.	Kota Bekasi	1,517,825	1,748,529	15,20 %
19.	Kota Bogor	818,430	916,069	11,93 %
20.	Kota Cirebon	613,963	681,528	11,05 %
21.	Kota Depok	959,840	1,105,463	15,17 %
22.	Kota Sukabumi	521,106	500,385	- 3,98 %
23.	Kota Tasikmalaya	623,745	696,344	11,64 %
24.	Kota Cimahi	607,497	614,148	1,09 %
25.	Kota Banjar	385,563	319,155	- 17,22 %
26.	Kab. Bandung Barat	837,568	991,422	18,36 %
Total		30.054.702	31.537.070	

(sumber : berdasarkan data pada www.djpk.depkeu.go.id dan diolah kembali)

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bagaimana gambaran pertumbuhan belanja daerah dari masing-masing kota/kabupaten di Jawa Barat. Dapat kita lihat pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing daerah tidak merata, terlihat

sebagian daerah menunjukkan pertumbuhan yang tinggi dan sebagian daerah lain menunjukkan pertumbuhan yang rendah.

Hal ini membuat perbedaan yang sangat signifikan sehingga menunjukkan telah terjadi kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah yang menyebabkan kesenjangan kesejahteraan antar daerah. Mengingat berdasarkan teori keyness, APBD merupakan salah satu mesin pendorong ekonomi dan belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka menurut tabel diatas, dapat terlihat beberapa daerah yang belum bisa mengelola keuangannya yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Peranan APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Kebijakan pengelolaan APBD difokuskan pada optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan, belanja dan pembiayaan bagi tercapainya sasaran atas agenda-agenda pembangunan tahunan.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Dalam UU No.32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan Sumber Daya Alam. Disamping Dana Perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah

memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan penggunaan dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dapat dikatakan sebagai faktor - faktor yang mempengaruhi belanja daerah dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang berkaitan langsung dengan pembiayaan belanja daerah, dan Dana Alokasi Umum sendiri merupakan sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Dana Alokasi Umum menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Oleh karena itu kedua faktor diatas termasuk dalam anggaran pendapatan, yang kontribusinya mempengaruhi terhadap pembiayaan belanja daerah.

Selama ini alokasi belanja daerah dipenuhi melalui penerimaan dalam APBD. Dalam Pasal 155 ayat 1 UU No.32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa “penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.” Sejalan dengan hal tersebut, Mardiasmo (2002:135) menyatakan bahwa untuk membiayai pelaksanaan atas desentralisasi maka pembiayaan kegiatan-kegiatan tersebut bersumber dari APBD. Pengalokasian belanja daerah sangat bergantung pada pendapatan yang diterima oleh masing-masing pemerintah daerah baik itu dari

sumber pendapatan daerah yaitu PAD maupun bantuan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil, dengan begitu pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakatnya.

Adapula peneliti sebelumnya yang menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Pulau Jawa, Bali, maupun Sumatera. Salah satunya penelitian oleh Noni Puspita Sari pada tahun 2009 yang ditulis dalam Jurnal Akuntansi 42 yang berjudul Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut menunjukkan DAU memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Langsung, sedangkan PAD memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap Belanja Langsung, bahwa PAD secara individual tidak mempengaruhi Belanja Langsung. Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Bambang Prakosa pada tahun 2004 yang berjudul Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah pada Kota/Kabupaten di Jawa Tengah memperoleh hasil bahwa sandaran Pemerintah Daerah untuk menentukan jumlah belanja daerah suatu periode berbeda. Dalam satu tahun bersamaan PAD lebih dominan daripada DAU, tetapi untuk satu tahun berikutnya DAU lebih dominan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sampel dan data yang digunakan, apabila pada penelitian sebelumnya sampel dan data yang digunakan adalah Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Riau, maka pada penelitian ini sampel dan data yang digunakan adalah Kota/Kabupaten yang

berada di wilayah Provinsi Jawa Barat periode tahun 2009-2010. Dengan pertimbangan bahwa dengan berjalannya waktu dapat terlihat perubahan dalam pelaksanaan otonomi di daerah masing-masing dan lebih terpusat pada satu wilayah provinsi saja yaitu Jawa Barat. Maka menurut uraian diatas, peneliti tertarik membuat penelitian dengan judul “ **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran Dana Alokasi Umum (DAU) di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat
2. Bagaimana gambaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat
3. Bagaimana gambaran Belanja Daerah di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat
4. Bagaimana pengaruh DAU dan PAD secara parsial dan simultan terhadap Belanja Daerah di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran Dana Alokasi Umum (DAU) di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui gambaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat

3. Untuk mengetahui gambaran Belanja Daerah di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat
4. Untuk mengetahui pengaruh DAU dan PAD secara parsial dan simultan terhadap Belanja Daerah di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat

1.4 Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian sudah selayaknya memiliki kegunaan baik untuk penulis maupun pihak lain yang memerlukan. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian diharapkan dapat berguna untuk memperluas pengetahuan akuntansi sektor publik mengenai pengelolaan keuangan daerah pada Kota/Kabupaten di Jawa Barat, khususnya mengenai pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak yaitu :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah selaku pengelola keuangan daerah, dalam menentukan Belanja Daerah yang disesuaikan dengan DAU dan PAD yang diterima daerah

2. Bagi Penulis

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dari informasi yang diperoleh, serta menambah pengalaman peneliti dalam bidang penelitian.

3. Bagi Dunia Pendidikan

Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan untuk dijadikan bahan pembelajaran dan untuk kemajuan pendidikan. Serta sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

